

AKAR DAN PERKEMBANGAN KONSERVATISME ISLAM DALAM PERPOLITIKAN INDONESIA

Irvan Tasnur

Universitas Negeri Yogyakarta
irvantasnur.2018@student.uny.ac.id

Zulkarnain

Universitas Negeri Yogyakarta
Zulkarnain@uny.ac.id

Abstract

Conservatism as an ideology has regained attention in the life of the Indonesian people in recent years, this is due to the existence of a series of several major events so that the issue of ideology re-emerges before the public. Along with the rise of ideological issues, the involvement of media framing has led to the formation of negative stigma towards ideology, especially those based on Islamic teachings. This study aims to explore and analyze the process of birth and the development of Islamic conservatism in Indonesia using a historical approach. The results of the analysis that the term conservatism will always be related to traditionality, but the different traditional meanings in each country will cause different forms of conservatism. The meaning of traditionality in Indonesian society is more identical to Islamic groups which, if explored further, is caused by the existence of propaganda to create a sense of inferiority complex that is carried out by the Dutch due to fears of resistance led by Islamic groups. The Islamic struggle to re-establish Islamic teachings in the midst of national life continues after Indonesia's independence up to now with various forms, one of which is the political party that makes Islam the sine qua non and raison d'être of the party, these Islamic parties continue dwelling on the dynamics of Indonesian history to date which are detailed in this article.

Keywords: conservatism, traditionality, inferiority complex, Islam, politics

Abstrak

Konservatisme sebagai suatu ideologi kembali mendapatkan perhatian dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia di beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh adanya rangkaian beberapa peristiwa-peristiwa besar sehingga isu ideologi kembali mengemuka ke hadapan publik. Seiring dengan melejitnya isu ideologi, keterlibatan framing media menyebabkan terbentuknya stigma negatif terhadap ideologi khususnya yang berlandaskan pada ajaran keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis proses lahir dan berkembangnya konservatisme Islam di Indonesia menggunakan pendekatan historis. Hasil telaah dan analisis ditemukan bahwa pengistilahan konservatisme akan selalu berkaitan dengan sifat tradisional, namun makna tradisional yang berbeda di tiap-tiap negara akan menyebabkan berbedanya bentuk-bentuk konservatisme. Makna tradisional pada masyarakat Indonesia lebih identik kepada golongan Islam yang bila ditelusuri lebih jauh lagi, hal tersebut disebabkan oleh adanya propaganda untuk menciptakan rasa *inferiority complex* yang dilakukan oleh pihak belanda akibat kekhawatiran terjadinya perlawanan yang dimotori oleh golongan Islam. Perjuangan Islam untuk kembali menegakkan ajaran-ajaran keislaman ditengah kehidupan berbangsapun terus berlanjut pasca Indonesia merdeka hingga kini dengan berbagai bentuk, salah satunya adalah partai politik yang menjadikan Islam sebagai *sine qua non* dan *raison d'être* dari partai tersebut, partai-partai Islam inilah yang terus berkuat dalam dinamika sejarah Indonesia hingga kini yang secara terperinci dijelaskan dalam artikel ini.

Kata Kunci: konservatisme, tradisional, inferiority complex, Islam, politik

Pendahuluan

Memahami ideologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dilakukan dengan mudah, untuk memahaminya diperlukan suatu kajian komprehensif dari berbagai paradigma. Bukan hanya melihatnya sebatas dari sudut tujuan, namun juga melihatnya sebagai kenyataan “pilihan-pilihan” masyarakat. Pandangan mengenai ideologi akhir-akhir ini memiliki makna yang negatif, disebabkan oleh pemahaman setengah-setengah yang didapatkan oleh masyarakat melalui *framing* media. Media yang diidentikkan dengan perpolitikan menyebabkan seringkali ideologi dikarakteristikan

sebagai suatu bentuk propaganda politik yang salah kaprah, terlalu muluk dan mengada-ada (Cahyono, 1984: 3). Namun, dibalik konotasi negatif tersebut, ideologi masih memegang peranan penting dalam kehidupan manusia.

Secara garis besar ideologi memiliki dua pengertian utama yaitu secara fungsional dan struktural. Secara fungsional ideologi diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama yang dianggap paling baik bagi suatu masyarakat atau negara, sedangkan secara struktural berarti sebagai suatu sistem pembenaran terhadap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah/penguasa (Suardi, 2015: 10). Berangkat dari pengertian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ideologi bukanlah suatu bentuk propaganda yang negatif dalam sisi fitrahnya, namun akan menjadi negatif apabila dimanfaatkan hanya sebagai alat dalam hal struktural guna melegitimasi kekuasaan yang ada. Ideologi tidak muncul secara kebetulan dan tiba-tiba namun biasanya muncul sebagai respon terhadap kebutuhan terkait dengan solusi, cara, dan *counter discourse* terhadap suatu permasalahan tertentu.

Telah banyak ideologi berkembang di tengah masyarakat dunia, tak jarang perbedaan ideologi terjadi antara negara dalam konteks luas hingga ke tingkat personal dari masing-masing individu. Tak ayal hal tersebut menyebabkan terjadinya dualisme ideologi bahkan lebih, banyaknya ideologi yang dianut secara sadar maupun tidak, telah memberikan suatu peluang terhadap individu untuk melakukan dekonstruksi terhadap ideologi tertentu. Penyesuaian-penyesuaian terhadap ideologi ini melahirkan suatu modifikasi baru dan menciptakan varian-varian ataupun melahirkan suatu ideologi baru. Sebagai tambahan, hal utama penyebab terjadinya perubahan atau lahirnya suatu ideologi disebabkan oleh karena adanya krisis yang dialami ideologi yang telah mapan, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut diciptakannya suatu ideologi baru sebagai jalan pintas yang dianggap mampu untuk menyelesaikan problematika dalam masyarakat (Cahyono, 1984: 14).

Bila dilihat dari paradigma historis, dapat diketahui bahwa ideologi lahir sebagai suatu bentuk jawaban terhadap kegelisahan. Salah satu ideologi tersebut adalah liberalisme yang lahir pada abad ke 17 sebagai akibat adanya rasa ketertindasan masyarakat dengan sistem feodal yang menjerat kedalam kemiskinan, lahirnya liberalisme juga bisa dikaitkan dengan adanya euforia kebebasan pada masyarakat eropa yang telah sekian abad terbelenggu dalam dogma-dogma gereja. Runtuhnya feodalisme menyebabkan masyarakat feodal yang masih ingin kembali berkuasa, kemudian berusaha mencari suatu formulasi baru ideologi, guna

mempertahankan atau mengembalikan status quo dari masyarakat tersebut, yang dalam perjalanannya ideologi tersebut dinamakan sebagai konservatisme (Surbakti, 1992 :45). Kata konservatisme sering diidentikkan dengan makna tradisionalitas, kata ini-pun sering muncul dalam istilah ekonomi maupun pendidikan. Namun dalam pengertian politik, konservatisme dianggap sebagai salah satu filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional (Jasin, 2014:54).

Perkembangan dari paham konservatisme sebagai ideologi dalam perpolitikan bukan hanya berkembang di benua Eropa dan Amerika melainkan juga merambat ke kawasan Asia. Berbeda halnya dengan ideologi-ideologi lain yang memiliki makna interpretatif yang serupa dalam penerapannya, seperti penerapan ideologi komunisme di Rusia, China dan Korea Utara yang pada umumnya memiliki pola yang sama, konservatisme sebagai ideologi politik walaupun mempunyai ciri khas tersendiri, dalam penerapannya dapat berbeda di setiap negara. Hal tersebut disebabkan karena adanya interpretatif berbeda terhadap istilah melanggengkan atau kembali ke sifat “tradisional”. Tradisional dalam berbagai negara tentunya memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang memandang tradisional sebagai bentuk negara monarki seperti yang dikemukakan kaum konservatif Inggris, ada yang memandang konservatif sebagai kembalinya masyarakat ke dalam pemberlakuan syariat Islam dan sistem khilafah, serta ada yang memandang konservatisme sebagai kembalinya manusia ke akar budayanya masing-masing, serta lain sebagainya.

Konservatisme di Indonesia pada akhir-akhir ini mulai menyeruak ke permukaan disebabkan adanya berbagai peristiwa besar. Masyarakat maupun beberapa ahli sering mengidentikkan konservatisme ke dalam pengertian agama, di mana adanya suatu lembaga organisasi kemasyarakatan maupun politik yang hendak kembali berusaha untuk menegakkan syariat Islam yang kemudian dianggap sebagai suatu paham yang konservatif. Ketidakjelasan batasan terhadap justifikasi terhadap ideologi konservatisme menyebabkan hal tersebut sangat menarik dikaji dalam lingkup ilmiah yang lebih mendalam lagi. Maka dari itu, untuk mengkaji akar konservatisme Islam di Indonesia penulis akan mencoba melacak perjalanan historis ideologi konservatisme Islam dalam dunia politik di Indonesia. Kajian ini akan menggunakan metodologi sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Konservatisme sebagai Suatu Ideologi Politik

Memahami konservatisme sebagai suatu ideologi politik sebaiknya berangkat dari proses pengkajian terhadap pengertian masing-masing variabel yang membentuk struktur kalimat tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat menganggap konservatisme sebagai suatu ideologi yang mencoba mempertahankan ataupun mengembalikan sistem tradisional. Bila ditinjau dari segi bahasa konservatisme berasal dari bahasa Yunani *conservare* yang memiliki arti melestarikan, menjaga, memelihara, dan mengamalkan (Jasin, 2014:54). Menurut kamus bahasa Indonesia konservatisme diartikan suatu paham politik yang ingin mempertahankan kondisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan setapak demi setapak, serta menentang perubahan yang radikal (Kamus besar bahasa Indonesia online).

Dari beberapa pengertian di atas dapat diabstraksikan bahwa konservatisme sebagai suatu paham mempunyai tujuan utama untuk mempertahankan sistem tradisional yang telah mapan, namun tetap tidak menghalangi suatu perubahan yang sifatnya bertahap. Melestarikan sistem tradisional identik dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dalam lingkup sosial, kebudayaan yang berbeda di masing-masing negara menyebabkan terjadinya perbedaan tujuan dari kaum konservatif. Secara garis besar terdapat dua tujuan utama dari golongan konservatif yakni pertama, melestarikan status *quo* yang telah berjalan sejak lama, seperti yang telah dilakukan oleh partai konservatif Inggris yang menganut paham *toryisme*, mereka berusaha “membela” sistem monarki agar tetap bertahan pada abad ke 17 dan ini dianggap oleh Bryan Magee sebagai gerakan konservatif yang paling beradab karena didukung oleh argumen rasional, bahkan dihormati oleh para penentangannya (Magee, 2008: 119).

Tujuan kedua adalah berusaha mengembalikan nilai-nilai dari zaman lampau (*the status quo ante*) (Jasin, 2014). Mengenai tujuan ini, telah banyak contoh yang dapat dilihat dengan memperhatikan negara-negara di mana partai politik konservatif memenangkan pemilu, salah satu contoh yaitu Amerika, bila di Inggris konservatif identik dengan mempertahankan status quo sistem monarki, di Amerika golongan konservatif menghendaki adanya keterlibatan pemerintah dalam berbagai bidang. Sesuai dengan tujuan untuk mengembalikan nilai-nilai dari masa lampau, politisi konservatif di Amerika akan mendukung peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara moral sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang telah lama dianut dalam masyarakat (Surbakti, 1992 :47).

Konservatisme sebagai ideologi tampaknya memang agak sulit untuk diidentifikasi dikarenakan adanya perbedaan arti “tradisional” serta latar belakang budaya yang berbeda-beda di tiap-tiap negara. Untuk memudahkan proses pengklasifikasian terhadap ideologi ini, perlu memahami gejala-gejala sebagai penanda suatu organisasi, masyarakat maupun partai politik menganut ideologi konservatisme. Ramlan Surbakti mengidentifikasi terdapat tiga gejala utama penanda berlakunya konservatisme, pertama adanya pemahaman bahwa masyarakat yang terbaik adalah mereka yang tertata, kedua pemerintah memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggung jawab dan terakhir adanya kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap pihak yang lemah (Surbakti, 1992 :46).

Ciri ciri ajaran konservatisme sendiri tidak jauh beda dari suatu gejala yang tampak. Tidak sama halnya dengan gejala-gejala yang secara empiris bisa diamati dan bukan lagi dalam tataran teoretis, ciri-ciri konservatisme dalam sisi idealnya memiliki empat ciri utama yakni: *pertama*, mementingkan lembaga kerajaan dan gereja (lembaga keagamaan), *kedua*, agama, tradisi dan kebiasaan dalam tata kehidupan masyarakat dianggap sebagai kekuatan utama, *ketiga*, lembaga yang telah mapan seperti keluarga, gereja (lembaga keagamaan) dan negara dianggap suci dan yang *keempat*, menentang radikalisme dan skeptisisme. Dari sudut pengertian, ciri-ciri serta gejala yang timbul dalam realitas empiris maka setidaknya hal tersebut dapat dijadikan sebagai patokan berpikir kritis terhadap proses analisis konservatisme yang di Indonesia.

Sebelum masuk dalam pergumulan konservatisme dalam ideologi politik Indonesia, penyamaan persepsi awal terhadap definisi “ideologi politik” terlebih dahulu harus dibedah. Antony Down menjelaskan ideologi politik sebagai *Á verbal Image of the good society and the chief means of constructing such a society* (Down, 1957: 96). Sementara Firmanzah menjelaskan bahwa ideologi politik sebagai *sine qua non* dan *raison d’être* dari sebuah partai politik, ideologi memuat secara implisit maupun eksplisit tentang aturan-aturan bersifat normatif tentang sesuatu yang tidak dan seharusnya dilakukan (Firmanza, 2010: 107).

Penjelasan di atas memuat beberapa inti pokok berkenaan dengan definisi dari ideologi politik. Secara sederhana ideologi politik merupakan suatu paham yang berfungsi sebagai landasan dan memuat tentang berbagai aturan baik yang dapat maupun tidak dapat dilakukan dalam suatu organisasi politik atau partai politik demi menjamin terwujudnya kehidupan masyarakat yang baik. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan dapat disintesis bahwa ideologi adalah suatu barang wajib yang harus dimiliki oleh partai

politik untuk mencapai tujuan dari parpol dalam rangka mewujudkan masyarakat baik sesuai yang telah dicita-citakan dalam ideologi tersebut.

Tradisionalitas Masyarakat Indonesia

Kata konservatisme selalu merujuk pada suatu tatanan nilai yang bersifat kuna atau telah berjalan secara turun temurun. Menilik dari sisi kesejarahan, istilah tradisional tentunya akan berkembang dari waktu ke waktu karena sifat ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi terus maju secara linear ke arah depan. Bahkan peradaban di abad ke 21 yang ditopang oleh teknologi, menyebabkan tradisionalitas dari suatu budaya akan berjalan sangat cepat karena penemuan-penemuan dan pengembangan teknologi yang berjalan bagaikan “kilat”. Konsep di atas merupakan pengantar guna memahami arti “tradisional” yang terdapat dalam sistem masyarakat Indonesia.

Indonesia atau Nusantara adalah negara kepulauan yang memiliki sejarah panjang, lahirnya budaya di nusantara bukan hanya terbentuk dari tata kebiasaan masyarakat asli namun merupakan perpaduan dari berbagai entitas kebudayaan dari berbagai negara. Sebut saja Agama Hindu-Budha yang berasal dari india dan mulai masuk pada abad keempat masehi hingga abad ke 13, kemudian disambung oleh Agama Islam pada abad ke 13 yang telah terpapar budaya-budaya lain seperti mesir arab dan persia, dalam perkembangan selanjutnya pada abad ke 16 mulailah Indonesia diperkenalkan dengan budaya barat. Lamanya budaya barat mengakar di Indonesia, bukan hanya dalam sistem ekonomi tetapi sistem pengetahuan dan teknologi menyebabkan budaya asli mengalami degradasi secara perlahan, penduduk “dipaksa” berpikir dengan paradigma Netherland sentris.

Adanya pengkotak-kotakan atau tipologi terhadap kebudayaan, telah dimulai pada abad ke 16. Masyarakat nusantara mulai mendapatkan doktrin bahwa kebudayaan asli penduduk (Percampuran Hindu-Budha dan Islam) merupakan kebudayaan primitif, sedangkan kebudayaan yang dibawa oleh penjajah adalah kebudayaan beradab dan bersifat modern. Tentunya apabila dikaji dari sisi perkembangan teknologi dan pengetahuan, justifikasi tersebut sifatnya masih *debatable* dan memihak, mengingat perkembangan pengajaran pada masa hindu dan budha memiliki kurikulum yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan dunia barat (Agung, 2016: 2-14). Namun, di luar dari kenyataan tersebut, pemerintah kolonial Hindia-Belanda mampu mengindoktrinasi

masyarakat muslim dan bangsawan bumi putera dengan rasa *inferiority complex*/rasa rendah diri guna melanggengkan kekuasaannya (Suryanegara, 2017: 168).

Lamanya Belanda menjajah di Indonesia dan masifnya proses indoktrinasi menyebabkan perspektif penduduk dalam memandang berbagai hal meliputi cara berpakaian, sistem pendidikan, dan lain sebagainya telah berubah. Kawasan Timur Tengah yang menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan kebudayaan sejak abad ke 16 mulai bergeser ke arah Barat. Pemikiran Islam, Hindu dan Budha kemudian dianggap sebagai sistem “tradisional” masyarakat Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata tradisional ini dimulai pada abad ke 16 dan diperuntukan bagi kebudayaan Indonesia yang mengandung ketiga unsur agama yang berkembang sebelum Belanda datang ke Indonesia. Istilah tradisional pada budaya ini terus berkembang hingga abad ke 20.

Memasuki abad kedua puluh dengan adanya pemberlakuan politik etis atau politik balas budi, masyarakat Indonesia telah memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah modern walaupun dengan jumlah partisipasi kaum bumi putera yang sangat terbatas berasal dari golongan bangsawan. Islam kemudian tampil menjadi salah satu agama yang terbuka dalam segi pendidikan, hal ini dapat dilihat dengan pembukaan sekolah-sekolah Islam modern yang dipelopori oleh Muhammadiyah pada tahun 1911 (Nashir, 2010: 120). Semenjak tahun inilah mulai dibuka beberapa sekolah-sekolah modern berlandaskan agama Islam, keterbukaan pendidikan umat Islam semakin terasa dengan adanya upaya pembukaan sekolah-sekolah guru guna memenuhi kebutuhan tenaga pengajar oleh Muhammadiyah (Geertz, 2014:279). Secara ideal melihat fenomena ini tentunya agama mulai keluar dari alienasi terhadap Islam sebagai budaya yang tradisional, namun nampaknya paradigma yang telah mengakar bagaikan *world view* masyarakat sulit untuk kembali diubah sehingga justifikasi terhadap “Islam yang tradisional” masih berjalan, hingga setelah Indonesia merdeka.

Ideologi Konservatisme dalam Perpolitikan Hindia Belanda

Seperti paparan materi yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa konservatisme tidak secara eksplisit diterapkan dalam golongan-golongan tertentu di Indonesia. Sehingga pada pembahasan ini konservatisme akan diarahkan kepada justifikasi “tradisionalis” yang telah muncul dan berkembang pada abad ke 16 terhadap golongan agama-agama yang telah membentuk dan mengakar sebagai budaya Indonesia. Penaklukan Indonesia dimulai dengan peristiwa

penyerangan Jayakarta pada tanggal 28 Mei 1619 dengan kekuatan sebesar 1000 pasukan (Vlekke, 2008: 156), kejatuhan Jayakarta kemudian mengakibatkan kuatnya posisi VOC di Nusantara. Setelah penaklukan tersebut, satu demi satu kerajaan-kerajaan di Nusantara tunduk ke dalam kekuasaan VOC. Implikasi dari berhasilnya proses kolonisasi oleh VOC tersebut menandakan kejatuhan secara politis sebagian besar kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Kehilangan kekuatan politis menyebabkan kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai lebih terbuka secara sosial dengan mengembangkan seni budaya dan pertunjukkan-pertunjukkan. Keeratan hubungan antara bangsawan dan rakyat yang telah timbul menjadi pemantik terjadinya berbagai pemberontakan pada masa VOC yang di kemudian hari hal tersebut dianggap sebagai akar lahirnya konservatisme tentunya berdasarkan sudut pandang pihak Belanda. Perang Jawa adalah salah satu dari sekian banyak perang yang terjadi dan dilatarbelakangi oleh faktor agama, Pangeran Diponegoro sebagai tokoh utama mempunyai tekad mendirikan *balad* (negara) Islam yang tidak jahiliah (merujuk pada VOC) sebagaimana tuntutan Al-Qur'an (Abdullah Dkk, 2012: 428). Akibat terjadinya peperangan yang menguras tenaga dan keuangan Belanda, timbullah sifat antipati terhadap agama Islam ditandai dengan pemberlakuan hukum atau peraturan-peraturan guna membatasi ruang gerak pendidikan keislaman di nusantara.

Agama Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduk atau bekas kerajaan yang telah ditaklukkan tentunya menjadi momok tersendiri bagi Belanda akibat terjadinya pemberontakan-pemberontakan. Ketakutan tersebut bukan hanya tercermin dari peraturan namun juga dalam regulasi aturan dalam bidang pendidikan. Bila menengok penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada masa Belanda tentunya tidak akan jauh dari politik etis yang telah berlaku sejak tahun 1901 yang memuat tentang usaha penyejahteraan negeri jajahan melalui migrasi, irigasi dan edukasi (Poeze, 2008:25-26). Namun, dibalik usaha yang terdengar mulia tersebut, hal itu dijadikan suatu momentum untuk menjauhkan rakyat nusantara dari nilai-nilai Islam melalui kurikulum yang berkilbat ke arah Barat. Sebagai tambahan sekolah-sekolah Belanda juga meniadakan pelajaran agama yang dianggap bersifat tradisional, bahasa Arab kemudian perlahan-lahan ditinggalkan dan digantikan oleh bahasa Belanda yang dianggap memiliki prestise tinggi dibandingkan dengan yang lain.

Mulai mengakarnya budaya Barat melalui pendidikan, bahasa dan kebiasaan dianggap sebagai suatu keberhasilan tersendiri oleh Belanda untuk menekan konservatisme dan memecah belah

umat Islam. Namun, ada suatu hal yang tidak dipertimbangkan sebelumnya bahwa pengajaran-pengajaran dengan konteks agama Islam masih terus berlangsung dan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat pribumi yang tidak dapat menempuh pendidikan di sekolah negeri buatan Belanda karena terkendala oleh biaya yang sangat besar. Selain itu bangsawan bumi putera juga tidak dapat dipisahkan dengan Islam, walaupun telah belajar keilmuan Barat di sekolah-sekolah Belanda namun mereka tetap harus mempelajari nilai-nilai Islam sebagai landasan keilmuan yang notabene merupakan budaya yang telah menjadi identitas di Nusantara. Dari sinilah kemudian memunculkan tokoh-tokoh politik perjuangan yang berbasis agama di abad ke 20.

Islam yang semula dianggap tradisional perlahan memperbaiki citranya melalui pendidikan Islam namun dengan cara yang lebih modern. Usaha tersebut dipelopori oleh beberapa tokoh Islam seperti KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) di Yogyakarta, Syaikh Ahmad Soorkati (1872-1943) di Surabaya dan Haji Rasul (1879-1945) di Minangkabau (Karim, 2005: 6). Tujuan utama dari pendidikan ini adalah untuk menghilangkan *Khurafat* dan *takhayul* yang melemahkan otensi umat muslim serta secara politis bertujuan untuk membangkitkan spirit Islam dalam diri masyarakat Indonesia agar terbebas dari penjajahan. Perkembangan pendidikan Islam di Hindia-Belanda menjadi pendorong tersendiri terhadap berkembangnya organisasi-organisasi modern Islam dalam perpolitikan nasional.

Secara umum dalam pergerakan nasional Indonesia organisasi pergerakan dibagi menjadi tiga dasar yang berbeda. *Pertama*, adalah organisasi pergerakan yang terbentuk atas paham nasionalisme seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Budi Utomo dan organisasi lainnya, *kedua*, partai yang berlandaskan keagamaan seperti Al-Irsyad, Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persatuan Islam dan lain sebagainya, dan terakhir suatu organisasi yang berlandaskan sosial seperti Murba dan Partai Komunis Indonesia (Karim, 2005: 46). Khusus partai Islam, terdapat pola yang berbeda dalam melancarkan gerakan-gerakan menuju kemerdekaan, sebagian besar memilih dengan cara kooperatif namun yang lainnya memilih untuk bersifat nonkooperatif. G.F. Pijper mengungkapkan bahwa pada umumnya hubungan golongan Islam dan pihak penguasa cenderung baik, sebagian besar kongres-kongres yang diadakan oleh organisasi Islam dihadiri oleh perwakilan penguasa walaupun terkhusus untuk Muhammadiyah biasanya akan berjalan tegang dan kaku (Baudet, 1987: 251).

Golongan konservatif yang mengarah kepada organisasi-organisasi Islam dalam tataran pergerakan lebih didominasi oleh

perbaikan sosial-kultural dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan seperti apa yang dicita-citakan oleh golongan lain. Mereka belum mampu merealisasikan kembalinya penggunaan syariat sebagai hukum formal seperti yang telah dianut sebelumnya dalam sistem kerajaan Islam, disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk melawan penjajah. Sehingga prioritas utama golongan konservatif perlahan-lahan bergeser menjadi keutamaan untuk mencapai kemerdekaan sebagai pintu gerbang dalam mewujudkan tatanan negara sesuai dengan yang termaktub dalam ajaran Islam.

Dilematis Golongan Konservatif dalam Euforia Kemerdekaan Hingga Orde Lama

Pasca proklamasi kemerdekaan 1945, semua golongan yang telah ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan, ikut ambil bagian dalam penentuan arah dan tujuan Indonesia di masa yang akan datang. Tiga golongan utama tersebut yaitu Islam, komunis, dan nasionalis yang diawal kemerdekaan kembali “berseteru” akibat perbedaan bentuk negara yang dicita-citakan secara ideologis. Bukanlah suatu rahasia umum bahwa, motif pendorong terjadinya gerakan-gerakan ke arah kemerdekaan Indonesia, memiliki landasan yang berbeda beda. Golongan konservatif Islam tentunya menginginkan suatu bentuk negara Islam yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan tuntutan dalam Islam. Namun, komunis dan golongan-golongan yang condong ke arah sekuler dan ikut ambil bagian dalam perjuangan bangsa tentunya menolak terhadap dominasi agama dalam suatu negara, hal ini menyebabkan perseteruan berkepanjangan antara kedua golongan tersebut.

Perseteruan yang terjadi, mereda dengan tampilnya Ir. Soekarno dari golongan nasionalis yang mengilhami digalinya suatu landasan kenegaraan (Pancasila) berdasarkan nilai agama yang kemudian dipadupadankan dengan konsepsi nasionalis maupun sosialis. Tindakan yang dilakukan oleh Soekarno merupakan keberhasilan terbesar dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia, bukan hanya menempatkan skala prioritas kepada usaha mempertahankan kemerdekaan, akan tetapi mampu mengubah paradigma tokoh-tokoh perjuangan muslim terhadap suatu negara yang ideal.

Kondisi kondusif yang telah diciptakan bersama tidak berlangsung lama, persatuan antara beberapa organisasi pergerakan hanya bersifat “semi permanen” guna mempertahankan kemerdekaan. Ketidakpuasan khususnya beberapa tokoh pejuang yang berlandaskan Islam seperti Kartosoewirjo dan Kahar Muzakkar,

terhadap bentuk negara kembali meruncing ketika Indonesia secara resmi diakui oleh negara Belanda pada akhir 1949. Gerakan kekecewaan tersebut menyebabkan meletusnya pemberontakan DII/TII yang kembali berusaha menciptakan negara berlandaskan agama. Peristiwa ini terjadi antara tahun 1953-1960 dan memakan korban jiwa sebanyak 22.950 jiwa, melenyapkan 115.282 buah rumah serta kerugian materil sebanyak Rp. 650 juta (Tim Buku Tempo, 2016: 90).

Walaupun dalam segi konteks pemberontakan DI/TII berlandaskan ideologi agama yang masuk dalam kategori tradisional, namun peristiwa ini sama sekali tidak dapat digolongkan sebagai kelompok yang berpegang pada konservatisme sebagai ideologi politik, karena salah satu ciri konservatisme adalah menentang radikalisme dan menghendaki perubahan dilakukan secara perlahan serta bersifat konstitusional sesuai dengan aturan yang berlaku di negara di mana konservatisme itu tumbuh dan berkembang. Seiring dengan pemberontakan yang terjadi, sebenarnya telah terdapat usaha kaum konservatif untuk mencapai tujuannya melalui jalan konstitusional. Pada penyelenggaraan pemilu tahun 1955 dari jumlah total 27 partai politik peserta pemilu, terdapat empat partai politik berlandaskan Islam yaitu Masyumi, NU, Partai Syariat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Tarbiyah Islamiah (Gazali: 1989: 8).

Hasil pemilu tahun 1955 menempatkan Masyumi dan NU masuk dalam empat besar pemenang pemilu dengan jumlah kursi masing-masing 57 dan 47 kursi dari total keseluruhan 257 kursi. Namun dibalik jumlah kemenangan yang cukup besar oleh partai Islam, terdapat perbedaan mendasar visi masing-masing partai politik Islam. Perbedaan tersebut juga yang menyebabkan pecahnya Masyumi pada tahun 1947 dengan PSII dan Partai NU pada tahun 1952, sehingga golongan Islam yang telah dicap sebagai kaum konservatif walaupun secara jumlah mempunyai posisi yang baik, namun ketidaksihlian kedua partai tersebut dan perbedaan cara dalam menginternalisasi nilai-nilai agama Islam ke dalam perundang-undangan berakibat pada gagalnya pembuatan UU berdasarkan ideologi Islam. Selain hal tersebut sulitnya partai Masyumi dan NU secara konstitusional mengarahkan negara ke jalur syariat, disebabkan kedua partai tersebut tidak mendapatkan kemenangan telak dalam pemilu 1955, tidak adanya perolehan suara yang dominan menyebabkan partai-partai nasionalis-kebangsaan dan berlandaskan ideologi Marxisme tetap memegang andil yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada masa pemerintahan liberal golongan konservatif dan Ir. Soekarno kembali bersitegang terkait dengan rencana Soekarno untuk mengumandangkan dekrit Presiden, dengan tujuan kembali kepada UU 1945. Penolakan terhadap dekrit Presiden terjadi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu melanggar UUDS 1950 karena telah membatalkan hasil pemilu 1955, di mana jalan konstitusional tersebut merupakan sarana yang paling tepat bagi golongan konservatif untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam kedalam rancangan undang-undang yang baru. Perlu kita ingat bahwa, arah perpolitikan golongan konservatif semenjak ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi negara, dan kesepakatan bentuk negara Indonesia sebagai Negara Republik, golongan konservatif tidak lagi berusaha membentuk negara Islam tetapi lebih ke arah proses nomokrasi Islam.

Nomokrasi Islam adalah suatu bentuk konsep negara hukum berdasarkan hukum Islam yang berasal dari Allah (Fatkhurohman, 2010: 47). Konsepsi inilah yang kemudian berusaha diwujudkan oleh golongan konservatif, usaha ini merupakan sebuah jalan yang sifatnya konstitusional dan legal karena secara yuridis historis Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, serta Indonesia kembali dipertegas sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Maka dari itu, proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam UU negara berupaya dilakukan oleh NU dan Masyumi sebagai partai berideologi Islam, kesempatan tersebut terbuka luas ketika pemilu 1955 karena tujuan dari pemilu tersebut adalah untuk melahirkan lembaga konstituante guna merumuskan UU baru bagi negara Indonesia. Namun keluarnya dekrit Presiden 5 juli 1959 menyebabkan buyarnya angan-angan kaum konservatif, yang berujung pada penekanan dan pembubaran partai politik Islam seperti yang dialami oleh Masyumi pada tahun 1960 setelah dekrit Presiden.

Pasca dekrit Presiden, partai-partai konservatif Islam perlahan-lahan kehilangan taringnya, partai Islam seperti PSII dan NU yang ikut menolak tentang rencana dekrit Presiden berbalik arah dengan mendukung rencana tersebut. Sedangkan, Masyumi bersama dengan PSI yang menolak hal tersebut, kemudian dituduh menjadi dalang pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Bola panas yang dilontarkan oleh Soekarno tidak mampu dibendung oleh Masyumi, melalui produk Penpres No. 7 tahun 1959 junto Perpres No. 13 tahun 1960 yang telah diubah dengan Penpres No. 25 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai dan keputusan berada ditangan Presiden, Masyumi dibubarkan dengan Kepres No. 200/1969

(Fatkhurohman, 2010: 105). Hal ini menandakan kekuatan dua partai Islam yang sangat besar sekalipun sebagai pemenang pemilu mampu ditekan oleh sosok Soekarno. Pembubaran Masyumi tersebut merupakan awal kemunduran konservatisme Islam di Indonesia, dan digantikan oleh kebangkitan TNI dan PKI dalam dunia perpolitikan tanah air.

Penyederhanaan Partai Politik dan Melemahnya Kekuatan Golongan Islam Pada Masa Orde Baru

Kejatuhan orde lama dengan segala dinamika dan peristiwa mengiringi prosesnya, menjadi angin segar bagi kaum muslimin khususnya modernis Islam. Masyumi yang telah dibubarkan tahun 1960, kembali diizinkan berdiri dengan menggunakan nama berbeda yaitu Permusi (Persatuan Muslim Indonesia) pada bulan Februari 1968, tindakan ini dilakukan guna menampung aspirasi modernis yang tidak dapat ditampung dalam partai Islam lainnya seperti NU, Perti dan PSII, agar tidak menyalurkan aspirasinya secara inkonstitusional (Bawazir, 2015:203). Namun, dibalik perizinan yang diberikan terdapat usaha untuk menekan Masyumi disebabkan adanya ketakutan akan kembalinya partai Islam tersebut seperti yang dialami tahun 1955.

Penekanan terhadap Permusi pada masa orde baru, terjadi bahkan di awal pembentukan dan perumusan kepengurusan partai. Radi (1984: 19-68) menjelaskan bahwa dalam muktamar yang dilakukan oleh Permusi di Malang telah diputuskan Muhammad Roem terpilih menjadi ketua partai, namun dengan desakan oleh pemerintah pusat, Roem mengundurkan diri dan digantikan oleh H. Djarnawi Hadiekoesomo dan Lukman Harun sebagai sekretaris umumnya, tindakan tersebut diambil guna menghindari menguatnya Permusi dalam kanca perpolitikan akibat dipimpin oleh tokoh nasional kelas I seperti M. Roem. Hal ini menandakan hegemoni yang kuat oleh pemerintah pada masa orde baru tidak dapat dilawan bahkan oleh kekuatan Islam yang pernah berjaya pada masa orde lama. Hasil pemilu 1971 memperkuat posisi pemerintah dengan menempatkan Golkar sebagai pemenang dengan 62,82% suara, sedangkan partai-partai konservatif Islam seperti NU, Permusi, PSII dan Perti masing-masing mendapatkan 18,68%, 5,36%, 2,39% dan 0,69% (KPU, 2000: 52)

Kuatnya posisi pemerintah melalui partai Golongan Karya menyebabkan sulitnya mewujudkan Nomokrasi-Islam dalam artian menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam aturan-aturan negara yang telah sekian lama diperjuangkan oleh partai konservatif Islam. Selain

itu, proses internalisasi ini juga mengalami kendala akibat perbedaan penafsiran dan visi masing-masing partai dalam hal cara menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Meskipun dalam perkembangannya, pasca pemilu partai-partai Islam dilebur ke dalam PPP dengan landasan UU No. 3 tahun 1975, usaha ini hanya merupakan gimik pemerintah pusat dengan alasan penyederhanaan partai politik. Mengakarnya Golkar terlebih tidak netralnya ASN/Pejabat pemerintahan menyebabkan Golkar mendapatkan kemenangan mutlak dengan lebih dari 50% suara dalam pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Posisi PPP sebagai wakil dari Islam selalu hanya menempati posisi kedua, namun hal tersebut hanyalah sebatas hiburan semata, karena dengan perolehan suara Golkar yang lebih dari 50%, bisa dikatakan aturan perundang-undangan hanya bisa dibuat dan disahkan/disetujui oleh golongan karya. Hal ini sekaligus menandai ketidakberdayaan partai politik Islam dalam menjaga ataupun membuat aturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran syariat.

Selain masalah perbedaan ideologi antara golongan-golongan konservatif Islam, serta kecilnya suara Islam di parlemen, masalah lain penyebab ketidakberdayaan partai partai Islam konservatif disebabkan juga adanya aturan dalam UU Pemilu yang telah disahkan pada tanggal 22 November 1969. UU tersebut menetapkan mengenai hak pemerintah untuk mengangkat sepertiga dari anggota MPR dan 100 dari 460 anggota DPR termasuk sipil dan wakil-wakil ABRI (Fatkhurohman, 2010: 127). Aturan ini sangat merugikan bagi partai Islam maupun partai PDI, karena sebelum berlangsungnya pemilu bisa dikatakan bahwa pemenang telah ditentukan, aturan ini juga melahirkan sistem otoritarian karena dominannya pemerintah tanpa ada kontrol dari oposisi.

Secara umum tataran kehidupan keislaman pada masa orde baru terpolarisasi. Perjuangan umat Islam menurut Fachry Ali dan Bachtiar Efendy terpolari dalam empat model yaitu neo-modernisme, sosialisme-demokrasi, universalisme atau internasionalisme dan modernisme (Aly, 1986: 167-175). Model pertama dan kedua menghasilkan pola inklusivisme yang mengambil tempat di luar dari pemerintahan, sedangkan model kedua menghasilkan pola eksklusivisme yang mengambil tempat dalam pemerintahan seperti mereka yang terlibat dalam PPP (Musa, 2011: 98). Pola inilah yang terus berlangsung dalam proses perjuangan umat Islam di Indonesia bahkan setelah terjadinya reformasi, namun dengan terbelahnya umat Islam ke dalam tipologi-tipologi ini, perjuangan umat muslim konservatif semakin melemah disebabkan oleh demobilisasi fokus perjuangan golongan Islam.

Angin Segar Partai Politik Islam Setelah Reformasi

Gelombang reformasi yang bergulir pada tahun 1998 mulai merubah cara pandang kemasyarakatan maupun pemerintahan di Indonesia. Walaupun reformasi menuntut perubahan secara perlahan, namun usaha de-ordebaruisasi terus digalakkan dalam seluruh bidang, baik dari segi pemerintahan, politik, ekonomi dan kebudayaan. Konstelasi politik akibat bergulirnya bola panas reformasi kemudian dimanfaatkan oleh seluruh golongan baik beraliran nasionalis, Islam, sosialis, dan kristen untuk kembali mendirikan partai-partai politik baru sebagai buntut perlawanan terhadap penyatuan secara “paksa” partai-partai kedalam tiga golongan utama yaitu PPP, PDI dan Golkar. Tercatat setelah terjadinya reformasi, partai-partai Islam yang dulunya tergabung dalam PPP terpecah menjadi beberapa golongan seperti yang digambarkan dalam tabel (1). Selain sebagai dampak reformasi, terpisahnya partai-partai beraliran Islam disebabkan akibat adanya perbedaan visi dan misi akan masa depan Islam, cara menegakkan atau menginternalisasi nilai-nilai Islam kedalam aturan-aturan negara dan Mazhab yang berbeda antara beberapa partai politik Islam.

Terdapat keunikan pola konservatisme Islam pasca terjadinya reformasi, Partai yang mempunyai basis pendukung dari kalangan masyarakat Islam mulai terbagi, bukan hanya masuk kedalam partai beraliran agama seperti PBB, PPP, PK, Masyumi dan PSII akan tetapi juga mulai menggunakan strategi melawan arus dengan membuat partai beraliran nasionalis namun mempunyai basis pendukung Islam seperti PKB dan PAN. Menurut Hamid Basaid, Dkk (1999:117) partai politik Islam terbagi menjadi dua golongan utama yaitu “Islam formal” dan “Islam informal”, partai formal Islam atau aliran agama pasca reformasi berusaha untuk menciptakan suatu fraksi Islam dalam parlemen guna mencapai nomokrasi Islam dalam arti sempit menginternalisasi syariat Islam kedalam aturan-aturan perundang-undangan secara perlahan-lahan, sedangkan partai Islam informal berusaha lebih menekankan platform pluralisme.

Perbedaan yang terjadi sebenarnya tidak menghilangkan sifat dasar konservatisme partai Islam tersebut. Basis suara yang berada pada golongan masyarakat Islam (NU dan Muhammadiyah) menyebabkan walaupun partai berkategori sebagai partai nasionalis, akan tetapi partai tersebut tetap berusaha untuk menjaga keeksistensian Islam dalam negara. Usaha tersebut sangat terlihat ketika partai Islam informal mengadakan kerja sama dengan partai Islam formal pada pemilu 1999 untuk melakukan *stembus accord*

guna mengamankan sisa suara yang tidak habis terbagi agar tidak hilang secara sia-sia (Basaid, 1999:117).

Tabel 1. Perkembangan Partai Politik Dari Masa Ke Masa.

Aliran	Awal Kemerdekaan (1908-1955)	Orde Lama (1955-1965)	Orde Baru (1965-1973)	Masa Reformasi (1999) ²
Nasionalis	PNI, PRN, PIR Hazairin, Parindra, Partai Buruh, SKI, PIR Wongsonegoro	PNI, PRN, PIR Hazairin, IPKI, Partai Buruh, PIR Wongsonegoro	PNI, IPKI, Golkar	PDIP, Golkar, PAN, PKB, PKP, PNI, PDI
Islam	Masjumi, NU, PSII, Perti	Masjumi, NU, PSII, Perti, PPTI, AKUI, PSII Abikusno	NU, PSII, Perti, Parmusi	PPP, PBB, PK, PSII, Masyumi
Komunis	PKI, SOBSI, BTI	PKI, ACOMA	-	-
Sosialis	PSI, GTI	PSI, MURBA	MURBA	PRD, MURBA
Kristen	Partai Katolik, Parkindo	Partai Katolik, Parkindo	Partai Katolik, Parkindo	PDKB, KRISNA,

Sumber: Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bila menengok perkembangan partai politik seperti yang tercermin dalam tabel (1) maka dapat terlihat bahwa perkembangan pesat partai-partai Islam sebenarnya terjadi pada masa demokrasi liberal diterapkan di Indonesia. Namun hal tersebut hanya berlaku apabila ukuran perkembangan dilihat dari kuantitas partai, sebaliknya jumlah partai yang banyak inilah yang menjadi awal terpecahnya Islam akibat perbedaan cara mencapai kepentingan masing-masing partai sehingga ide utama untuk menginternalisasi Islam ke dalam perundang-undangan mangkrak. Hal inilah coba dirajut kembali pasca reformasi, walaupun terjadi polarisasi PPP kedalam beberapa partai namun hal tersebut adalah jalan yang bijak dan tepat, mengingat PPP lahir sebagai akibat “perkawinan paksa”, sehingga pemisahan beberapa partai ini perlu dilakukan guna merajut kembali pengertian antara sesama partai Islam.

Hasil pemilu 1999 menunjukkan tidak adanya partai yang mendominasi suara, walaupun PDI-P memenangkan pemilu dengan total perolehan suara 33,76 persen , pengambilan keputusan dalam

parlemen masih sulit untuk dilakukan karena tidak adanya partai yang mendapatkan kemenangan telak dengan perolehan suara 50% plus 1 serta terjadinya fragmentasi partai politik. Adapun beberapa partai politik besar lain memperoleh suara masing-masing Golkar 22,46 persen, PKB 12,62 persen, PPP 10,72 persen, PAN 7,12 persen, PBB 1,94 persen dan PKS 1,36 % (A.R. Yuda, 2013: 125). Dalam pemilihan Presiden 1999 pada awalnya terdapat dua kandidat utama yaitu Megawati yang diusung oleh PDI-P dan Habibie yang diusung oleh Golkar, namun Habibie memilih untuk mengundurkan diri. Kejadian ini merupakan peluang terbaik kedua yang didapatkan oleh golongan konservatif Islam setelah pemilu 1955, untuk pertama kalinya seluruh golongan Islam dipersatukan oleh Amien Rais dalam poros tengah yang membawa Gusdur atau Abdul Rahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia dengan kemenangan 60 persen suara.

Terpilihnya Gusdur sebagai Presiden membawa angin segar terhadap partai golongan Islam. Namun, ada satu hal yang tidak dipertimbangkan sebelumnya oleh partai pengusung bahwa Gusdur lebih bersifat pluralistik agamais, sehingga dalam kebijakan-kebijakannya cenderung lebih menekankan persatuan dan toleransi antara umat beragama. Dalam teori konservatisme perubahan secara perlahan yang dilakukan oleh Gusdur adalah suatu langkah yang tepat, namun disisi lain terdapat beberapa kebijakan yang menimbulkan kontroversi dan menyakiti masyarakat khususnya golongan Islam seperti pernyataan maaf kepada PKI dan rencana pencabutan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pelarangan penyebaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Sikap pluralistik Gusdur semakin terlihat ketika memutuskan untuk melakukan hubungan dagang dengan israel yang notabene merupakan negara yang sangat "dibenci" oleh golongan Islam. Pandangan Gusdur lain terkait agama adalah ingin membumisasikan Islam nusantara yang tentunya ditentang oleh partai-partai Islam berhaluan modernis yang condong ke Arab. Akibat tindakan-tindakan kontroversial ini, poros tengah yang semula mendukung Gusdur mengalami perpecahan, yang berujung pada pemakzulan Gusdur pada tanggal 23 juli 2001.

Setelah lengsernya Gusdur dan perpecahan poros tengah, kekuatan Islam mengalami kemunduran yang sangat drastis. Sistem multi partai yang dianut menyebabkan tidak ada partai dapat memenangkan pemilu secara mutlak, partai-partai Islam yang mengalami perpecahan kemudian memutuskan untuk lebih berkolaborasi dengan partai-partai berhaluan nasionalis guna mewujudkan visi dan misi masing-masing partai. Tercatat dalam pemilu 2004, 2009 dan 2014 poros tengah tidak dapat terbentuk

kembali, keadaan ini menguntungkan bagi partai nasionalis namun sebaliknya kondisi ini merupakan sebuah kebuntuan politik bagi partai Islam, karena perpecahan tersebut secara tidak langsung semakin mempersulit golongan Islam dalam mewujudkan negara utopia kaum konservatif Islam tentang konsep negara yang didalamnya menganut nilai-nilai syariat Islam.

Penutup

Konservatisme sebagai ideologi politik merupakan suatu paham yang menghendaki untuk mempertahankan status quo suatu sistem tatanan pemerintahan yang telah berdiri lama atau mengembalikan sistem yang lama dan pernah berjaya sebelumnya. Konservatisme juga sering diidentikkan dengan sistem tradisional, dalam konteks keIndonesiaan kata tradisional tidak bisa lepas dari sejarah penjajahan Indonesia, Belanda yang menjajah selama kurang lebih 350 tahun mengalami pemberontakan-pemberontakan yang sebagian besar bermotif agama. Akibat pemberontakan tersebut Belanda mengalami kerugian bukan hanya materil namun juga memakan korban jiwa yang sangat besar. Ketakutan ini menyebabkan setelah meredanya pemberontakan, Belanda berusaha untuk mendoktrin kaum pribumi muslim melalui pendidikan dengan rasa *inferiority complex* yang berakibat tradisi-tradisi dalam agama Islam dianggap tradisional sedangkan tradisi barat adalah tradisi modern. Dalam sejarah perkembangan konservatisme Islam di Indonesia, terjadi beberapa usaha gelombang umat Islam untuk mewujudkan suatu negara yang berlandaskan Islam, sebut saja organisasi SI pada masa pergerakan hingga masa kemerdekaan seperti partai Masyumi, NU dan PSII. Namun usaha usaha yang dilakukan tidak pernah berhasil disebabkan adanya polarisasi kekuatan umat Islam kedalam beberapa partai yang mengakibatkan sulitnya terwujud nomokrasi Islam.

Pada masa orde baru posisi golongan konservatif Islam semakin ditekan dengan peleburan partai-partai tersebut menjadi satu partai yaitu PPP, akibat dari peleburan itu kekuatan Islam mengalami kemunduran yang sangat drastis. Pasca reformasi kekuatan Islam kembali terpolarisasi namun egoisme kepartaian dari masing-masing kelompok bisa ditekan dan melahirkan koalisi poros tengah. Koalisi inilah yang mampu mengantarkan Gus Dur sebagai Presiden RI yang ke 4, namun sifat pluralistik dari Gusdur menyebabkan golongan Islam yang menghendaki berlangsungnya internalisasi nilai-nilai Islam kedalam aturan-aturan pemerintahan

mengalami kendala dan berakibat pada bubarnya poros tengah dan berakhir dengan pemakzulan Gusdur pada tanggal 23 Juli 2001.

Setelah peristiwa tersebut partai politik beraliran konservatisme Islam, tidak lagi dapat menghimpun kekuatan secara penuh akibat adanya perbedaan visi, misi serta cara yang ditempuh guna menjaga eksistensi Islam dalam kanca perpolitikan. Bahkan dalam pemilu 2004, 2009 dan 2014 partai Islam tidak pernah bersatu dalam satu koalisi yang sama, dan mereka memilih untuk bergabung dengan koalisi yang menempatkan mereka di posisi yang menguntungkan, akibat dari hal tersebut bisa dikatakan konservatisme di Indonesia belum dapat memenuhi cita-citanya disebabkan adanya ketidak kompakn dari partai-partai beraliran Islam serta diakibatkan juga oleh adanya sistem multipartai yang mengakibatkan tidak ada satupun partai dapat memenangkan pemilu secara mutlak. Tidak adanya partai pemenang secara mutlak akibat adanya sistem multipartai ini, sangat baik untuk dipertahankan guna menyeimbangkan seluruh kepentingan dari aliran-aliran kepartaian dan mencegah timbulnya pemerintah yang bersifat otoriter.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Taufik, Dkk. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Kolonisasi dan Perlawanan*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Agung, Leo dan T. Suparman. 2016. *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Aly, Fachry dan BachtiarEffendy. 1985. *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan.
- A. R. Yuda, Hanta. 2013. *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baudet, H. 1987. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bawazir, Tohir. 2015. *Jalan Tengah Demokrasi: antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Basaid, Hasyip, Dkk.1999. *Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Politik Islam dari Pra-pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*. Bandung: Pustaka Alvabeta.
- Biro Humas Komisi KPU. 2000. *Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta*. Jakarta: KPU.
- Cahyono, Cheppy Hari. 1985. *Ideologi Politik*. Yogyakarta: PT. Kanindita.

- Downs, Anthony. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. Newyork: Harper & Row.
- Firmanza. 2010. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fatkhurohman. 2010. *Perubahan Partai Politik di Indonesia: Tinjauan Historis Normatif Pembubaran PARPOL Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- Gazali, Zulfikar, Anhar Gonggong dan JR. Chaniago. *Sejarah Politik Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa :Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jasin, Johan. 2014. *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Karim, M. Abdul. 2005. *Islam dan Kemerdekaan Indonesia: Membangun Marjinalisasi Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan*. Yogyakarta: Sumbangsih Press.
- Magee, Bryan. 2008. *The Story of Philoshopy: Kisah Tentang Filsafat: Volume Takhayul Membakar Dunia, Filsafat Memadamkannya*. Yogyakarta: Kansius.
- Musa. 2011. *Nasionalisme di Persimpangan: Pergumulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nasir, Haedar. 2010. *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Poeze, Harry A, Dkk. 2008. *Di negeri penjajah: orang Indonesia di negeri Belanda, 1600-1950a*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- <https://kbbi.web.id/konservatisme>, Diakses pada (12 Maret 2019/ Jam 19.07.)
- Suardi, Moh. 2015. *Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2017. *Api Sejarah 2*. Bandung: PT. Salamadani.
- Tim Buku Tempo. 2016. *Seri Tempo: Kartosoewirjo*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Vlakke, Bernard Hubertus Maria. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.